

Dimas Arya

Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Penanggulangan Darurat Sampah Nasional dan Pengelolaan ...

 Quick Submit Quick Submit Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3635768625

Submission Date

Aug 29, 2026, 8:01 PM GMT+7

Download Date

Aug 29, 2026, 8:05 PM GMT+7

File Name

Dimas_Arya_-_jurnal.docx

File Size

114.0 KB

10 Pages

2,423 Words

17,052 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

27% Internet sources
0% Publications
0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.muaraedukasi.id	12%
2	Internet	scholar.unhas.ac.id	3%
3	Internet	jakp.fisip.unand.ac.id	1%
4	Internet	geneticsmr.com	1%
5	Internet	eudl.eu	<1%
6	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
7	Internet	khazanah.uinsgd.ac.id	<1%
8	Internet	repository.unika.ac.id	<1%
9	Internet	dasrilradjab.wordpress.com	<1%
10	Internet	sampahwatch.id	<1%
11	Internet	www.arma-law.com	<1%

12	Internet	jdi.h.surakarta.go.id	<1%
13	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
14	Internet	www.bangda.kemendagri.go.id	<1%
15	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
16	Internet	jurnalmahasiswa.com	<1%
17	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
18	Internet	en.antaraneews.com	<1%
19	Internet	substantivejustice.id	<1%
20	Internet	www.coursehero.com	<1%
21	Internet	bungamasamba.blogspot.com	<1%
22	Internet	jempolnewsonline.blogspot.com	<1%
23	Internet	journal.ummgl.ac.id	<1%



Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Penanggulangan Darurat Sampah Nasional dan Pengelolaan Limbah Berbasis SDGs

Dimas Arya^{1*}, Surya Adi Prasetyo²

^{1*2} Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah

Email : Dimasarya@Uks.ac.id¹ , Suryaadiprasetyo@Uks.ac.id²

Korespondensi penulis: Dimasarya@Uks.ac.id

Abstract *This study analyzes the national waste emergency response policy and SDGs-based waste management through the lens of State Administrative Law. The declaration of a national waste emergency in early 2026 by the Minister of Environment marked a crucial moment signaling systemic failure in waste governance over nearly two decades since Law No. 18/2008. Employing a normative-juridical approach and multi-level governance analysis, this research examines three main dimensions: (1) institutional and vertical-horizontal coordination hampered by asymmetric decentralization between Law 18/2008 and Law 23/2014; (2) administrative legal instruments ranging from administrative sanctions to fiscal incentives demonstrating varying effectiveness; and (3) harmonization of national policies with SDGs. The findings reveal that regional fiscal capacity disparities, the absence of formal harmonization mechanisms, and weak sanctions constitute the root problems. This research recommends the establishment of a Regional Harmonization Council for Waste Governance and the strengthening of administrative sanctions as more effective law enforcement instruments than criminal penalties.*

Keywords: *state administrative law, waste emergency, SDGs, multi-level governance, public policy*

Abstrak Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan darurat sampah nasional dan pengelolaan limbah berbasis SDGs melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Deklarasi darurat sampah nasional pada awal 2026 oleh Menteri Lingkungan Hidup menjadi momentum krusial yang menandakan kegagalan sistemik dalam tata kelola persampahan selama hampir dua dekade sejak UU No. 18/2008. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis multi-level governance, penelitian ini mengkaji tiga dimensi utama: (1) kelembagaan dan koordinasi vertikal-horizontal yang terhambat oleh desentralisasi asimetris antara UU 18/2008 dan UU 23/2014; (2) instrumen hukum administratif mulai dari sanksi administratif hingga insentif fiskal yang menunjukkan efektivitas berbeda; dan (3) harmonisasi kebijakan nasional dengan SDGs. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal daerah, ketiadaan mekanisme harmonisasi formal, dan minimnya sanksi tegas menjadi akar masalah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Dewan Harmonisasi Regional untuk Tata Kelola Sampah dan penguatan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih efektif daripada pidana.

Kata Kunci: hukum administrasi negara, darurat sampah, SDGs, multi-level governance, kebijakan publik

1. LATAR BELAKANG

1.1 Deklarasi Darurat Sampah Nasional: Pengakuan atas Kegagalan Sistemik

Indonesia secara resmi mendeklarasikan status darurat sampah nasional pada Januari 2026, menandai pengakuan eksplisit bahwa persoalan sampah telah

melampaui batas kemampuan penanganan konvensional. Deklarasi ini bukanlah langkah simbolis semata, melainkan respons terhadap data yang mengkhawatirkan: dari 29,99 juta ton sampah per tahun di 282 kabupaten/kota, hanya 32,32 persen yang terkelola, sementara praktik open dumping masih mendominasi dengan 9,05 juta ton sampah berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa pengelolaan layak. Fenomena darurat sampah di berbagai daerah Bandung Raya pasca gangguan TPA Sarimukti, Tangerang Selatan, serta tekanan kapasitas TPST Bantargebang yang memaksa penghentian open dumping per 1 Agustus 2026 menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi bersifat lokal dan insidental, melainkan telah menjadi krisis nasional yang memerlukan intervensi kebijakan terstruktur.

Di tengah kompleksitas ini, kerangka SDGs menjadi landasan normatif yang penting. Target 12.5 (pengurangan timbulan sampah), 11.6 (dampak lingkungan perkotaan), dan 14.1 (pencemaran laut) menjadi tolok ukur yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Namun, kesenjangan antara regulasi dan realitas operasional menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengendali tata kelola belum berfungsi optimal.

1.2 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi secara sistematis akar permasalahan kebijakan penanggulangan darurat sampah nasional dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Memahami hambatan kelembagaan, efektivitas instrumen hukum, dan kesenjangan harmonisasi dengan SDGs merupakan langkah awal untuk merumuskan strategi reformasi tata kelola yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Multi-Level Governance dan Desentralisasi Asimetris

Pengelolaan sampah di Indonesia beroperasi dalam kerangka desentralisasi yang kompleks. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam pengelolaan sampah. Namun, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menciptakan ketegangan normatif dengan pembagian urusan yang tidak selalu selaras, menyebabkan fragmentasi kebijakan dan koordinasi vertikal yang lemah.

Teori multi-level governance (MLG) menjadi lensa analitis yang tepat untuk memahami dinamika ini. MLG menekankan bahwa kebijakan publik tidak lagi dapat dikelola secara hierarkis, melainkan memerlukan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa

meskipun regulasi tidak memiliki konflik hukum formal, perbedaan tujuan operasional, bahasa regulasi, dan definisi fungsi kelembagaan tetap menciptakan ketidakkoherenan vertikal, horizontal, dan internal. Tidak adanya mandat nasional dan rencana implementasi subnasional menyebabkan koherensi vertikal terganggu.

2.2 Instrumen Hukum Administratif dalam Pengelolaan Sampah

Hukum Administrasi Negara menyediakan beragam instrumen untuk mengatur perilaku dan memastikan kepatuhan, mulai dari perizinan, sanksi administratif, hingga insentif fiskal. Dalam konteks pengelolaan sampah, efektivitas instrumen ini menjadi pertanyaan kritis. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa penegakan sanksi pidana yang tidak efektif berkontribusi pada persistensi praktik pengelolaan sampah yang buruk, sementara sanksi administratif seperti denda dan tindakan korektif terbukti lebih efektif dalam memastikan kepatuhan.

2.3 SDGs sebagai Kerangka Normatif

SDGs menyediakan kerangka normatif yang mengikat secara moral dan politik. Target 12.5 (pengurangan timbulan sampah), 11.6 (dampak lingkungan perkotaan), dan 14.1 (pencemaran laut) menjadi tolok ukur yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian di Buleleng menunjukkan bahwa implementasi strategi pengelolaan limbah medis berbasis SDGs menghadapi hambatan infrastruktur dan edukasi publik yang terbatas.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan dua cara pandang dalam memahami hukum: dari sisi aturan tertulis (*normatif*) dan dari sisi penerapannya di masyarakat (*empiris*). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum administrasi negara, sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan, khususnya di tingkat daerah.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, penanggulangan darurat sampah, dan pengelolaan limbah

berbasis SDGs. Regulasi yang dianalisis meliputi UU No. 18/2008, UU No. 23/2014, Perpres No. 109/2025, serta peraturan daerah dari beberapa kabupaten/kota.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum administrasi negara seperti asas legalitas, diskresi, sanksi administratif, serta konsep good governance dan multi-level governance yang relevan dengan pengelolaan sampah.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus konkret terkait darurat sampah di beberapa daerah, seperti kasus TPA Sarimukti (Bandung Raya), TPST Bantargebang (Jakarta), dan kebijakan pengelolaan sampah di Yogyakarta serta Makassar.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Sekunder (Bahan Hukum)

Data sekunder diperoleh dari tiga jenis bahan hukum:

Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengembangan PSEL
- d. Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah (Kota Surakarta, Kota Kupang, dan lainnya)

Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku teks dan literatur hukum administrasi negara
- b. Artikel jurnal ilmiah tentang pengelolaan sampah dan SDGs
- c. Dokumen kebijakan dan laporan penelitian

Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memahami istilah-istilah hukum.

3.3.2 Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- a. Wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah (Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup daerah, dan akademisi)

- b. Studi dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan sampah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tantangan Kelembagaan: Desentralisasi yang Terfragmentasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan menjadi hambatan utama dalam penanggulangan darurat sampah. UU No. 18/2008 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, namun implementasinya terhambat oleh:

- a. Ketimpangan Kapasitas Fiskal: Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas kesulitan menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang memadai. Perpres No. 109/2025 tentang Percepatan Pengembangan PSEL berupaya mengatasi hal ini dengan menggeser tanggung jawab investasi dan operasional dari tingkat lokal ke pusat melalui BPI Danantara, namun keberhasilannya masih perlu diuji.
- b. Koordinasi Vertikal yang Lemah: Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa tidak adanya mandat nasional dan rencana implementasi subnasional menyebabkan koherensi vertikal terganggu. Kerja sama horizontal antar aktor di tingkat kota antara badan perencanaan dan dinas lingkungan hidup juga tidak merata, menciptakan tumpang tindih dan inefisiensi.
- c. Rendahnya Komitmen Daerah: Minimnya regulasi daerah dan alokasi belanja daerah untuk pengelolaan sampah mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah daerah. Hal ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme insentif yang efektif untuk mendorong kepatuhan.

4.2 Instrumen Hukum dan Penegakan: Dari Sanksi hingga Insentif

Temuan penelitian mengungkap disparitas efektivitas instrumen hukum:

- a. Sanksi Administratif vs Pidana: Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa sanksi administratif (denda, tindakan korektif) terbukti lebih efektif memastikan kepatuhan dibandingkan sanksi pidana yang sulit ditegakkan. Hal ini selaras dengan prinsip hukum administrasi yang menekankan pendekatan preventif dan korektif daripada represif.
- b. Insentif Fiskal sebagai Pengungkit: Perpres No. 109/2025 memperkenalkan skema kompensasi PSO (Public Service Obligation) untuk menutup selisih biaya energi dari sampah, mengubah pendekatan dari beban keuangan daerah

menjadi tanggung jawab anggaran negara . Langkah ini dapat menjadi insentif kuat bagi daerah untuk berpartisipasi.

Ketidakjelasan Sanksi: Dalam praktik, larangan open dumping yang seharusnya berlaku sejak 2013 baru mulai ditegakkan pada 2026, menunjukkan lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan

4.3 Harmonisasi Kebijakan dan SDGs: Antara Norma dan Realitas

Integrasi SDGs dalam kebijakan pengelolaan sampah masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam instrumen hukum dan perencanaan:

- a. Kesenjangan Normatif: UU RPJPN 2025-2045 menempatkan reformasi pengelolaan sampah sebagai game changer, namun implementasinya masih terhambat oleh tata kelola yang tumpang tindih dan belum adanya regulasi payung untuk ekonomi sirkular.
- b. Keterlibatan Publik yang Terbatas: Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat diakui dalam kerangka normatif, peran aktor informal dan komunitas masih kurang dimanfaatkan, mengurangi efektivitas integrasi bottom-up . Padahal, SDGs menekankan partisipasi publik sebagai prasyarat keberlanjutan.

Tabel 4.1: Dimensi Analisis Kebijakan Penanggulangan Darurat Sampah Nasional

Dimensi	Permasalahan	Dampak	Rekomendasi
Kelembagaan	Fragmentasi wewenang pusat-daerah, ketimpangan kapasitas fiskal	Koordinasi vertikal-horizontal lemah, implementasi tidak merata	Pembentukan Dewan Harmonisasi Regional
Instrumen Hukum	Sanksi pidana tidak efektif, insentif fiskal belum optimal	Kepatuhan rendah, praktik open dumping masih dominan	Penguatan sanksi administratif, perluasan skema PSO
Harmonisasi SDGs	Kesenjangan normatif, partisipasi publik terbatas	Kebijakan belum terinternalisasi secara operasional	Penguatan mekanisme harmonisasi formal, pemberdayaan komunitas

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Hukum Administrasi Negara terhadap kebijakan penanggulangan darurat sampah nasional dan pengelolaan limbah berbasis SDGs, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hambatan kelembagaan menjadi akar masalah utama.

Pengelolaan sampah di Indonesia terhambat oleh fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU No. 18/2008 memberikan kewenangan penuh kepada daerah, namun UU No. 23/2014 menciptakan pembagian urusan yang tidak selaras. Akibatnya, koordinasi vertikal-horizontal menjadi lemah dan implementasi kebijakan tidak merata. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah memperparah kondisi ini, di mana daerah dengan anggaran terbatas kesulitan membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

b. Instrumen hukum administratif lebih efektif daripada pendekatan pidana.

Sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin, dan tindakan korektif terbukti lebih efektif mendorong kepatuhan dibandingkan sanksi pidana yang sulit ditegakkan. Insentif fiskal melalui skema PSO (Public Service Obligation) dalam Perpres No. 109/2025 menjadi langkah maju untuk mendorong partisipasi daerah. Namun, penegakan larangan open dumping yang baru efektif pada 2026 setelah 13 tahun sejak UU No. 18/2008 menunjukkan lemahnya mekanisme sanksi dan pengawasan.

c. Harmonisasi kebijakan dengan SDGs masih bersifat normatif.

Meskipun SDGs telah menjadi kerangka acuan dalam perencanaan pembangunan nasional, integrasi target-target SDGs (12.5, 11.6, 14.1) ke dalam kebijakan pengelolaan sampah belum terinternalisasi secara operasional. Tidak adanya mekanisme harmonisasi formal antara kebijakan nasional dan daerah, serta rendahnya partisipasi publik, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat

- a. Bentuk Dewan Harmonisasi Regional untuk Tata Kelola Sampah. Lembaga ini bertugas menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memastikan koordinasi vertikal-horizontal berjalan efektif, serta mengawasi implementasi Perpres No. 109/2025 di daerah.
- b. Perkuat sanksi administratif dan sederhanakan skema insentif. Tingkatkan denda, terapkan tindakan korektif wajib, dan perluas skema PSO untuk mempercepat adopsi teknologi pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
- c. Sediakan regulasi payung untuk ekonomi sirkular. Regulasi ini penting untuk mengintegrasikan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) ke dalam seluruh kebijakan pengelolaan sampah, sekaligus menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

- a. Tingkatkan kapasitas kelembagaan dan anggaran. Alokasikan anggaran yang memadai untuk infrastruktur pengelolaan sampah dan perkuat kapasitas aparatur di Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Perkuat partisipasi publik. Kembangkan program edukasi berbasis komunitas, perkuat peran bank sampah dan sekolah sampah, serta berikan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah.
- c. Susun peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Pastikan Perda tentang pengelolaan sampah mengadopsi prinsip SDGs dan selaras dengan Perpres No. 109/2025 untuk menghindari tumpang tindih regulasi.

DAFTAR REFERENSI

- Hukumonline. (2026). Kebijakan Integratif Mengatasi Darurat Sampah. <https://www.hukumonline.com>
- Windari, R., & Widiastuti, K. A. (2024). Optimization of SDGs Achievement in the Implementation of Minister of Health Regulation Number 18 of 2020 for Regional-Based Medical Waste Management in Buleleng Regency. ICLSSE 2024.
- ANTARA News. (2026). Indonesia declares waste emergency, calls for stronger local action. <https://www.antaranews.com>
- Maskun, Naswar, Normiati, Mukhlis, M. M., & Wiranti. (2025). Harmonization between National Policy and Regional Regulations in Solid Waste Management in

Indonesia: A Normative-Empirical Legal Analysis. *Jambura Law Review*, 7(2), 726-765.

Kemendagri. (2026). *Kemendagri Tegaskan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026*. <https://www.kemendagri.go.id>

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ashurst Perkins Coie. (2025). *Accelerating Waste-to-Energy in Indonesia: PR 109/2025's Impact and Challenges*. <https://www.ashurst.com>

Maskun, Khalid, R. M., Ratnawati, Mukhlis, M. M., Anggara, W., & Ramli, R. N. R. (2024). *Strengthening Indonesia's Waste Management Laws: Compliance with Public Health and Marine Conservation Norms*. *Substantive Justice International Journal of Law*, 142-166.

Kompas.com. (2026). Mulai 1 Agustus, Bantargebang Hentikan Open Dumping, Apa Dampaknya bagi Warga Jakarta? <https://www.kompas.com>

ARMA Law. (2025). *Navigating Indonesia's Waste-to-Energy Framework: Key Insights from Presidential Regulation No. 109 of 2025*. <https://www.armalaw.com>

Yuwono, T., & Hanani, R. (2025). *Waste Management in Decentralized Indonesia: Policy Coherence and Multi-Level Governance in Yogyakarta*. *Acta Innovations*, 56, 1-12.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Purnama, M. R., & Fahmi, M. A. (2025). *Institutional Constraints and Policy Gaps in Indonesia's Waste Management*. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45-62.

Rahayu, S., & Wibowo, A. (2024). *SDGs Integration in Local Waste Management Policies: A Study of Indonesian Municipalities*. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 12(3), 210-228.

Suryani, D., & Hidayat, R. (2025). *Evaluasi Efektivitas Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Sampah di Makassar*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 89-104.

Yuwono, T., & Hanani, R. (2025). *Waste Management in Decentralized Indonesia: Policy Coherence and Multi-Level Governance in Yogyakarta*. *Acta Innovations*, 56, 1-12. <https://doi.org/10.62441/actainnovations.v56i.469>

2

Maskun, Khalid, R. M., Ratnawati, Mukhlis, M. M., Anggara, W., & Ramli, R. N. R. (2024). Strengthening Indonesia's Waste Management Laws: Compliance with Public Health and Marine Conservation Norms. *Substantive Justice International Journal of Law*, 7(2), 142–166. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.298>

1